



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Slamet Soebjakto**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Susi Pudjiastuti**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Pudjiastuti

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya

Slamet Soebjakto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE				
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	102,25
		2.	Rata-rata pendapatan pembudidaya/bulan (Rp)	3.000.000
		3.	Pertumbuhan PDB Perikanan	8,0
COSTUMER PERSPEKTIVE				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	4.	Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri (pulau)	15
3	Terwujudnya pengelolaan sumber perikanan budidaya yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan	5.	Jumlah investasi bidang perikanan budidaya (Rp. Miliar)	24.000
		6.	Jumlah kredit program bidang perikanan budidaya yang disalurkan (Rp. Miliar)	325
		7.	Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton; non kumulatif)	19,46
		8.	Jumlah produksi ikan hias (miliar ekor; non kumulatif)	1,9
		9.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun; non kumulatif)	43,88
		10.	Persentase peningkatan PNBPN dari perikanan budidaya (persen)	10
		11.	Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dilakukan survailan dan atau monitoring (kab/kota; non kumulatif)	100
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE				
4	Tersedianya kebijakan pembangunan Perikanan Budidaya yang efektif	12.	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang PB	6,5
		13.	Jumlah RSNI 3 bidang perikanan budidaya (judul; non kumulatif)	30
		14.	Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya (dokumen; non kumulatif)	8
5	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan	15.	Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (unit; kumulatif)	678
		16.	Jumlah bantuan benih ikan (juta ekor)	100
		17.	Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut (kawasan)	300 (3.000 unit)
		18.	Jumlah unit produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB (unit; kumulatif)	5
		19.	Jumlah bantuan peralatan pakan mandiri (unit)	360
		20.	Jumlah bantuan bahan baku pakan (paket)	451
		21.	Jumlah kelompok produsen pakan (kelompok; non kumulatif)	200
		22.	Jumlah unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar (unit; kumulatif)	10.980
		23.	Jumlah penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya (bidang; non kumulatif)	15.000
		24.	Jumlah bantuan sarana budidaya di lokasi PSKPT (Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu)(paket)	163
		25.	Jumlah bantuan sarana budidaya ikan (paket)	1.500
		26.	Jumlah bantuan sarana rumput laut (paket)	1.756
		27.	Jumlah bantuan sarana minapadi (paket)	766
		28.	Jumlah bantuan sarana budidaya teknologi biofloc (unit)	25
		29.	Jumlah bantuan sarana budidaya kekerangan (unit)	60
		30.	Jumlah bantuan <i>excavator</i> (unit)	100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		31.	Jumlah bantuan Keramba Jaring Apung (unit)	450
		32.	Jumlah bantuan kincir air (unit)	2.000
		33.	Jumlah kelompok partisipatif yang melakukan pemeliharaan infrastrukturnya secara efektif (kelompok; non kumulatif)	235
		34.	Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/kota; kumulatif)	100
		35.	Jumlah hasil perekayasa teknologi terapan bidang perikanan budidaya (paket; non kumulatif)	80
6	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang profesional dan partisipatif	36.	Jumlah obat ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya (obat; kumulatif)	272
		37.	Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu (sampel; non kumulatif)	4.300
		38.	Jumlah jenis pakan ikan terdaftar (jenis; kumulatif)	1.000
		39.	Jumlah unit usaha budidaya yang memperoleh layanan perizinan (unit; kumulatif)	700
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE				
7	Terwujudnya aparatur sipil negara DJPB yang kompeten, profesional dan berkepribadian	40.	Indeks kompetensi dan integritas	77
8	Tersedianya manajemen pengetahuan DJPB yang handal dan mudah diakses	41.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	50
9	Terwujudnya birokrasi DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	42.	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi DJPB	A (89)
10	Terkelolanya anggaran pembangunan DJPB secara efisien dan ekuntabel	43.	Nilai kinerja anggaran DJPB (%)	83
		44.	Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup DJPB (%)	100

Program : Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 1.676,0 Miliar

No	Kegiatan	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	68.327
2.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	327.103
3.	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	388.494
4.	Pengelolaan Pakan Ikan	132.829
5.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	424.316
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	334.966

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan


Susi Pudjiastuti

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya


Slamet Soebjakto